

BAB 1

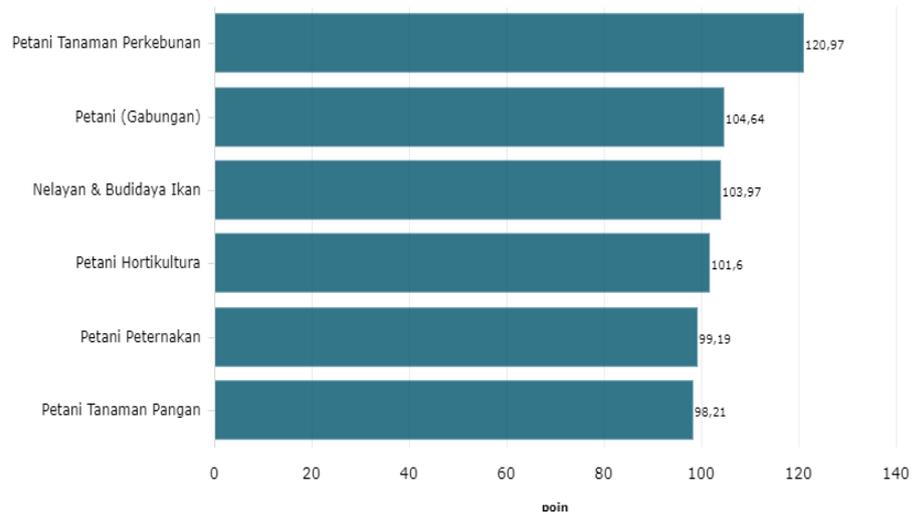
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dimana rata – rata sumber penghasilan masyarakat di Indonesia mengandalkan dari sektor pertanian. Peranan sektor pertanian ini penting dalam pertumbuhan ekonomi karena bisa mensejahterakan masyarakatnya dan juga sektor pertanian merupakan sumberdaya yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi saat ini dan seterusnya .

Sektor pertanian terbagi menjadi beberapa subsektor diantaranya tanaman pangan (tanaman padi dan tanaman palawija). Tanaman hortikultura (dicakup hanya tanaman sayuran dan buah-buahan). Tanaman perkebunan (meliputi perkebunan rakyat besar negara, dan besar swasta), tanaman kehutanan perikanan (perikanan tangkap dan budidaya) dan peternakan.

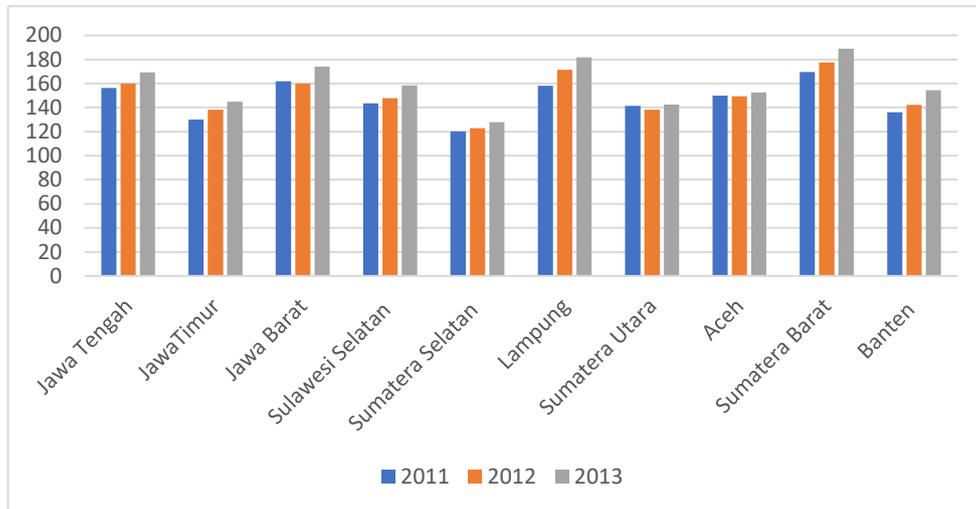
Subsektor perkebunan atau tanaman perkebunan tingkat kesejahteraan ekonominya tinggi di bandingkan sektor atau subsektor yang lain. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar petani tanaman perkebunan (NTPR) naik sebesar 15,96% menjadi 120,97 pada 2021 dibandingkan tahun sebelumnya masih di 104,32. Jika dibandingkan dengan awal hitungan indeks (2018=100) , tingkat kesejahteraannya telah meningkat 20,97%.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

GAMBAR 1.1 NILAI TUKAR PETANI MENURUT SUBSEKTOR (INDEKS, 2018=100)

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa Petani Tanaman Perkebunan tingkat kesejahteraan ekonominya tinggi di bandingkan sektor atau subsektor yang lain. Indeks harga yang diterima petani (It) pada subsektor tanaman perkebunan rakyat tahun 2011-2013 rata – rata Indonesia indeks harga yang di terima petani pada subsektor tanaman perkebunan rakyat cukup stabil setiap tahunnya, seperti di tahun 2011 141.46 , tahun 2012 145.20 dan 2013 151.10. Tabel 1.1 memperlihatkan Indeks harga yang di terima petani pada subsektor tanaman perkebunan rakyat pada 10 provinsi.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

GAMBAR 1.2. IT (INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI) SUBSEKTOR TANAMAN PERKEBUNAN

Pada tahun 2011-2013 grafik pada diagram batang cukup stabil di setiap provinsinya seperti di Jawa Tengah pada 2011 156.25, 2012 169.55, dan 2013 174.07. Indeks harga yang diterima subsektor tanaman perkebunan pada 10 provinsi Indonesia 2011-2013 cukup stabil untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yang signifikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan sektor pertanian, dikarenakan pengeluaran pemerintah ditujukan untuk membiayai pembangunan, dari pengeluaran tersebut akan dihasilkan produk – produk yang sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian daerah. Pengeluaran pemerintah di sektor

pertanian berfungsi dalam pendanaan pelaksanaan program – program yang telah dirancang oleh pemerintahan.

Menteri pertanian sebagai *Policy Maker* menetapkan 80% anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang memfokuskan untuk kesejahteraan petani, alokasi anggaran ini di perkuat untuk pembangunan pertanian. Anggaran Kementan tiap tahunnya terus menurun dari tahun ke tahun tetapi penurunan anggaran bukan menurunkan kinerja tetapi malah terus meningkat. Pengeluaran pemerintah menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan sektor pertanian.

Karena peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan kesejahteraan petani dari tahun ke tahun semakin membaik daya beli petani meningkat dan mereka mulai menikmati hasil yang mereka dapatkan dari hasil pertaniannya. Kementerian pertanian (Kementan) terus berupaya untuk meningkatkan investasi pada sektor pertanian dalam Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN). Karena investaesi adalah penggerak pertumbuhan ekonomi yang dimana investasi mampu membesarkan kapasitas produksi, nilai tambah bagi sektor pertanian di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, sektor pertanian yang ada di 10 Provinsi Indonesia belum stabil. Hal ini disebabkan masih belum meratanya dana anggaran Kementerian Pertanian (Kemetan). 10 provinsi ini dipilih karena 10 provinsi ini dalam segi peningkatan produksinya cukup stabil dibandingkan provinsi yang lain. Dengan itu diperlukan penelitian berkala mengenai pertumbuhan subsektor perkebunan yang diyakini dapat mempengaruhi sektor pertanian di 10 Provinsi Indonesia. Sehingga dapat digunakan sebagai upaya

perbaikan kebijakan dalam mengatasi subsektor perkebunan dan sektor pertanian di Indonesia .Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN, NILAI TUKAR PETANI DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN SUBSEKTOR PERKEBUNAN (STUDI KASUS 10 PROVINSI DI INDONESIA) “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, nilai tukar petani dan investasi antar 10 Provinsi Indonesia terhadap subsektor perkebunan?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, nilai tukar petani dan investasi terhadap subsektor perkebunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Melihat perkembangan pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, nilai tukar petani dan investasi antar 10 Provinsi Indonesia terhadap subsektor perkebunan
2. Melihat pengaruh pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, nilai tukar petani dan investasi terhadap subsektor perkebunan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menambah ilmu pengetahuan yaitu :

Mendeskripsikan secara empiris tentang keadaan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, nilai tukar petani dan investasi subsektor pertanian. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai subsektor perkebunan dan sektor pertanian di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait tentang pengeluaran pemerintah untuk subsektor perkebunan pertanian, nilai tukar petani dan investasi

